



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
  - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB V PENUTUP

**Pasal 3**

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 4**

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

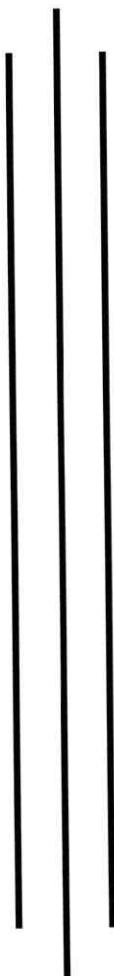
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 9 TAHUN 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA  
DAN TATA RUANG TAHUN 2026





PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



## RENCANA KERJA TAHUN 2026

### DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026.

Semoga Dokumen Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, September 2025

Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang  
Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730408 200212 1 005

## **DAFTAR ISI**

COVER DEPAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah .....	1
1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....	1
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	2
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Renstra.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	13
2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah .....	14
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan.....	15
2.3.3. Peluang dan Tantangan .....	21
2.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD.....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	32
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	32
3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP.....	53
5.1. Catatan Penting .....	53
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	53
5.3. Rencana Tindak Lanjut .....	54

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
- Tabel 2.4 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam
- Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam
- Tabel 3.2 : Target Tujuan dan Sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026
- Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakirana Maju Tahun 2027 Kota Batam
- Tabel 4.1 : Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

#### **1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

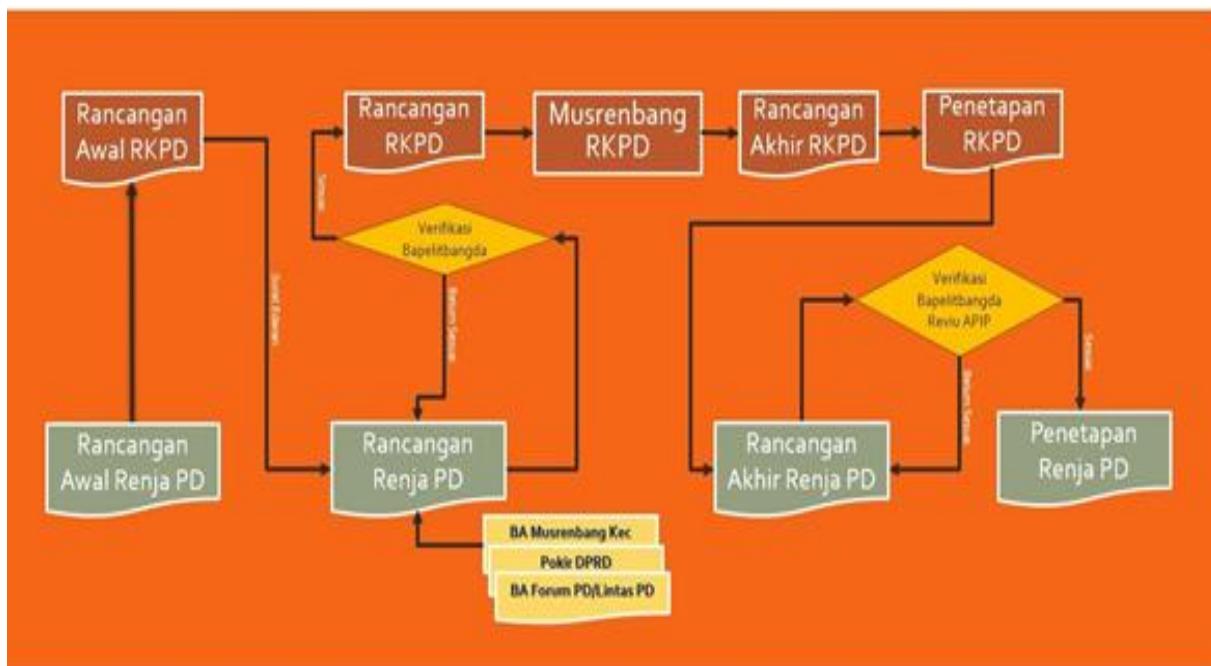
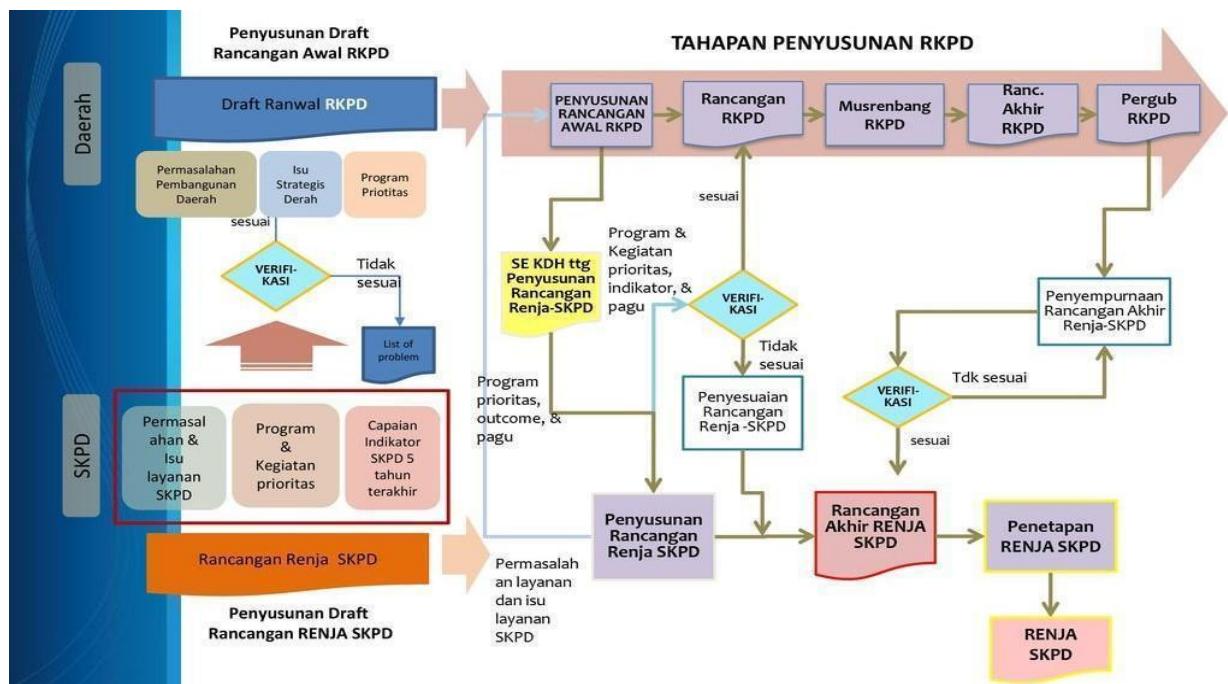
#### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Dokumen Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Dokumen Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Dokumen Renja
- c. Penyusunan Rancangan Dokumen Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Dokumen Renja
- f. Penetapan Dokumen Renja.

Dokumen Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

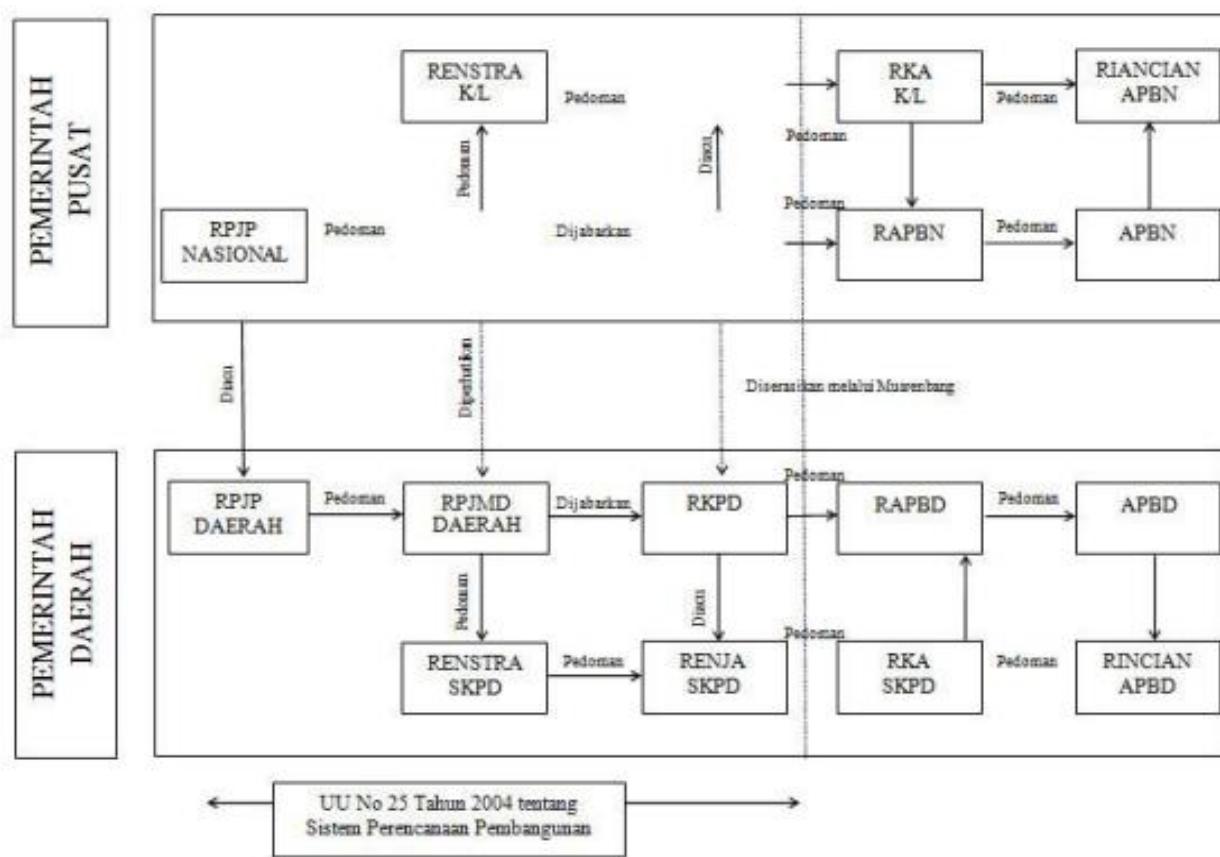
**Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPd**



### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Dokumen Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD. Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

## **Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 20 agustus 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 ( Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
27. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847);
28. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 249 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2022-2042;
29. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 250 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042;
30. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 251 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sagulung Kota Batam Tahun 2022-2042;
31. Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
32. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2025, tanggal 19 Agustus 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2026 (Berita Daerah 1614);
33. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun 2025-2029, tanggal ..... Tentang Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Batam;
34. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun 2025-2029, tanggal ..... Tentang Recana Strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Batam.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah untuk menjadi acuan tahunan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang sejalan dengan Renstra Perangkat Daerah, RPJMD Kota Batam, RKPD Kota Batam, serta kebijakan nasional dan provinsi, jika dirincikan secara detail adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pedoman kerja tahunan bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan terarah, terukur, dan sesuai prioritas pembangunan daerah;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan antara kebijakan pusat, provinsi, dan Kota Batam, khususnya di bidang cipta karya, infrastruktur perkotaan, penataan bangunan, dan tata ruang;
- c. Menjabarkan sasaran dan strategi Renstra ke dalam program dan kegiatan tahunan yang lebih operasional, sesuai kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran;
- d. Mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Batam melalui kontribusi nyata sektor cipta karya dan tata ruang, seperti peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penataan ruang yang berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas umum dan lingkungan hidup yang layak;
- e. Sebagai dasar penyusunan anggaran (RKA-SKPD) agar penggunaan sumber daya keuangan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam antara lain:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana tahunan yang lebih operasional agar mudah diimplementasikan sesuai prioritas pembangunan daerah;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di bidang cipta karya dan tata ruang secara terukur, berdasarkan permasalahan, isu strategis, serta aspirasi masyarakat;
- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam, sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan SKPD dan perencanaan daerah;
- d. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran, dengan merencanakan program/kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah;
- e. Mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur perkotaan, penataan ruang, dan lingkungan yang berkelanjutan, aman, dan nyaman bagi masyarakat;
- f. Menyediakan arah kebijakan tahunan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, agar setiap unit kerja memiliki pedoman yang jelas;
- g. Memastikan keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kota dalam bidang pembangunan infrastruktur, perumahan, permukiman, serta tata ruang wilayah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review

terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

#### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun (n) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2026.

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026.

#### BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 sebagaimana Tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dari target fisik yaitu 100% mencapai 99,63%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;  
Tidak ada program/kegiatan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota dari target fisik yaitu 49,61% mencapai 50,77%
  - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dari target fisik yaitu 15,28% mencapai 23,18%
  - c. Program Penataan Bangunan Gedung dari target fisik yaitu 66,67% Mencapai 82,50%
  - d. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dari target fisik yaitu 66,89% mencapai 66,95%
  - e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dari target fisik yaitu 87,91% mencapai 91,31%
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :
  - a. Melaksanakan Pengawasan yang kontinue dalam pelaksanaan program/kegiatan.
  - b. Adanya komitmen bersama di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur.
  - c. Adanya sinergitas antar bidang di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
  - d. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana public dan masyarakat umum menjadi lebih representative.
  - e. Adanya ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dan peningkatan pembangunan gedung pemerintah dan masyarakat dapat segera dilaksanakan.
- Faktor -faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu : karena adanya kendala di peraturan tentang aturan pembayaran tabungan perumahan rakyat (tapera)
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah terciptanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas sarana dan prasarana milik pemerintahan Kota Batam yang memadai di kota Batam. Evaluasi hasil pelaksanaan Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Percentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	-	-	-	-	90,81	52.90%	58.25%
		Nilai SAKIP PD	-	-	-	-	-	72,58	0	0
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
		Percentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	-	-	-	-	100 %	52.90%	52.90%
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/bulan	59 orang/bulan	59 orang/bulan	59 orang/bulan	100 %	165 orang/bulan	142 orang/bulan	86.06%
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	12 dokumen	6 dokumen	50 %
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
		Percentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	-	-	-	100 %	40.00%	40.00%
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12orang	12 Orang	12 orang	12 orang	100 %	3 orang	2 orang	40 %
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
		Percentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran						100 %	52.90%	52.90%
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 %	4 paket	4 paket	100%
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100%
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	12 dokumen	6 dokumen	50%
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	22.47%
1.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Percentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	-	-
		<b>Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	-	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>52.90%</b>	<b>52.90%</b>
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	3 unit	-	-	-	8 unit	8 unit	100%
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	5 paket	4 paket	4 paket	100 %	27 unit	27 unit	100%
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	35 unit	55 unit	55 unit	100 %	35 unit	35 unit	100%
1.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	-	-
		<b>Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>	-	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>52.90%</b>	<b>52.90%</b>
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	<b>100 %</b>	12 laporan	12 laporan	100%
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	<b>100 %</b>	12 laporan	12 laporan	100%
1.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	-	-
		<b>Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	-	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>52.90%</b>	<b>52.90%</b>
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	12 unit	12 unit	100 %	19 unit	19 unit	100%
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70 unit	74 unit	74 unit	100 %	64 unit	64 unit	100%
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.03.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Percentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
		<b>Percentase Rumah Tangga yang di layani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan</b>	-	-	-	-	-	52.92 %	52.92 %	100%
1.03.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100 %	1 BLUD	1 BLUD	100%
1.03.03	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Percentase penduduk yang terlayani air bersih</b>	45.36 %	49.61 %	49,40%	50.77 %	102.34 %	52.92 %	52.92 %	100%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.100 jiwa	1.148 jiwa	660 jiwa	892 jiwa	135.15 %	1.300 jiwa	1.300 jiwa	100%
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	1 dok	1 dok	100%
1.03.03.2.01.03	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 liter/detik	5 liter/detik	5 liter/detik	5 liter/detik	100 %	2.5 liter/detik	2.5 liter/detik	100%
1.03.03.2.01.05	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 liter/detik	5 liter/detik	5 liter/detik	5 liter/detik	100 %	5 liter/detik	5 liter/detik	100%
1.03.03.2.01.07	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	77 SR	77 SR	77 SR	77 SR	100 %	197 SR	197 SR	100%
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	24 unit	24 unit	28 unit	28 unit	100 %	33 SPAM	33 SPAM	100%
1.03.05	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Percentase penduduk yang terlayani sanitasi</b>	13.04 %	22.52 %	15.28 %	23.18 %	151.70 %	-	-	-
		<b>Percentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik</b>	-	-	-	-	-	57.64 %	57.64 %	100%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK	1.095 jiwa	1.095 jiwa	80 jiwa	80 jiwa	100 %	600 jiwa	600 jiwa	100%
1.03.05.2.01.06	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	219 Rumah Tangga	219 Rumah Tangga	16 Rumah Tangga	16 Rumah Tangga	100 %	133 Rumah Tangga	133 Rumah Tangga	100%
1.03.08	<b>PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Percentase bangunan gedung daerah yang dikelola</b>	16,67%	21,82%	66.67 %	82.50 %	123.74%	-	-	-
		<b>Percentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar</b>	-	-	-	-	-	16.67 %	10.00 %	59.98 %
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditanganai (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)	440 unit	576 unit	440 unit	551 unit	125.23%	440 unit	225 unit	51.14%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	-	330 dokumen	332 dokumen	100.61%	423 dokumen	423 dokumen	100 %
1.03.08.2.01.02	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	436 unit	572 unit	138 dokumen	138 dokumen	100 %	8 dokumen	8 dokumen	100 %
1.03.08.2.01.12	Pengubahauan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 unit	1 unit	30 unit	26 unit	86.67%	7 bangunan	7 bangunan	100 %
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
1.03.11	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Percentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	17,23%	17,66%	66.89 %	66.95 %	112.81%	-	-	-
		Percentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	-	-	-	-	-	16.67 %	16.67 %	100 %
		Percentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan	-	-	-	-	-	9.09 %	-	-
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Percentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina	18,37%	28,91%	67.35 %	99 %	172.18%	-	-	-
		Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	-	-	-	-	-	400 orang	400 orang	100 %
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	125 orang	218 orang	100 orang	189 orang	189%	300 orang	300 orang	100 %
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 orang	100 orang	150 orang	150 orang	100 %	19 lembaga (00 orang)	19 lembaga (00 orang)	100 %
1.03.12	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Percentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	54,95%	78,24%	87.91 %	91.31%	103.87%	-	-	-
		Percentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang	-	-	-	-	-	15.07 %	32.05 %	100%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	4 dokumen	4 dokumen	252 dokumen	500 dokumen	198.41 %	402 Dokumen	402 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.03.12.2.01.02	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	251 dokumen	249 dokumen	198.41 %	401 Dokumen	401 Dokumen	100%
1.03.12.2.01.03	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-	-	1dokumen	1dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>0%</b>
1.03.12.2.03.01	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.03.12.2.03.01	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>45 dokumen</b>	<b>128 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>420.59%</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>100%</b>
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan	45 dokumen	128 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	420.59%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Indikator kinerja kunci Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	Indeks Pelayanan Kesekretariatan			90.81	90.84	90.87	90.90	90.81	90.84	90.93	90.97	
2	Nilai SAKIP PD			72.58	74.33	75.33	77.33	72.58	74.33	79.33	81.33	
3	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Rumah tangga yang menggunakan air bersih		52.92	54.57	56.23	57.88	52.92	54.57	59.53	61.18	
4	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik	Rumah tangga yang menggunakan sanitasi		57.64	58.96	60.28	61.61	57.64	58.96	62.93	64.25	
5	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar			16.67	33.33	50	66.67	16.67	33.33	83.33	100	
6	Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi			16.67	33.33	50	66.67	16.67	33.33	83.33	100	
7	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan			9.09	27.27	45.45	63.64	9.09	27.27	81.82	100	
8	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang			15.07	32.05	49.04	66.03	15.07	32.05	83.01	100	

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengacu pada tugas dan fungsi organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, maka tugas pokok Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :

- Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi
- Serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, pencapaian Visi dan Misi Kota Batam menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, masuk dalam misi II (Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelaanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.) dan Misi IV Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

### **2.3.2. Permasalahan Dan Hambatan**

Perumusan strategi pembangunan, perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang, sarana pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan merupakan hasil telaah terhadap penetapan strategi pembangunan yang telah disusun sebelumnya dan kondisi permasalahan yang menginduksi perumusan visi dan penetapan misi serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Batam.

Ketersediaan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah domestik di wilayah hinterland, terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten, dan tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu merupakan suatu kebutuhan dasar publik saat ini. Ketimpangan pelayanan penyediaan air bersih/ air limbah domestik antara daerah mainland hinterland harus segera diatasi demi keadilan dan pemerataan serta menghindari kecemburuan sosial sangat berdampak pada kualitas hidup sehat dan penurunan stunting Kota Batam.

Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selaku pengampu urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana Kota Batam memiliki keunikan karena berbatasan langsung dengan negara luar seperti singapura dan malaysia. Kota Batam sendiri merupakan daerah strategis nasional yang merupakan objek industri vital nasional sehingga pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi setiap tahunnya. Dalam rangka menunjang Kota Batam Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera tentunya bukan suatu hal yang mudah, apalagi Kota Batam merupakan garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kepulauan Riau karena bersaing dengan negara tetangga agar iklim investasi dan ekonomi batam semakin maju dan bergerak pesat.

Seiring dengan tumbuh kembangnya dunia industri Kota Batam maka kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan juga akan semakin tinggi sedangkan ketersediaan lahan untuk infrastruktur perkotaan sangat minim. Lajunya pertumbuhan penduduk dan berkembangnya dunia usaha baik industri galangan maupun pariwisata memberikan dampak positif dari segi pendapatan daerah akan tetapi juga akan berbanding lurus dengan timbulnya kesenjangan sosial dalam penyediaan kebutuhan dasar hajat hidup orang banyak. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin besar tantangan yang harus dihadapi, karena bukan hanya permasalahan infrastruktur tetapi, akses air bersih, sanitasi yang menjadi tolak ukur keseimbangan pembangunan suatu daerah yang berwawasan lingkungan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib harus dipenuhi sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan tersebut, perlu langkah kongkrit dan tersistem dalam menggali potensi yang ada guna menunjang keberhasilan. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap beberapa faktor pendukung seperti potensi kekuatan (*Strength*) dan peluang-peluang (*Opportunity*) apa saja yang dapat dimanfaatkan sehingga mampu menopang tugas pokok dan fungsi organisasi. Selain analisis terhadap penunjang keberhasilan, maka perlu dilakukan juga analisis terhadap kelemahan (*Weakness*) agar dapat menciptakan peluang dan tidak melupakan analisis terhadap ancaman (*Threat*) yang akan terjadi sehingga ancaman yang dipetakan tidak memberi dampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sehingga strategi yang akan diambil menjadi efektif dan efisien sehingga apa yang menjadi tujuan perangkat daerah dapat terwujud diantaranya :

## 1. Analisis Kekuatan (*Strengths*)

### a. Kerangka Regulasi yang Jelas

Dinas CKTR Kota Batam bekerja berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kuat dalam pengelolaan tata ruang, infrastruktur, dan bangunan.

### b. Dukungan Pemerintah Kota dan Pusat

Adanya dukungan kebijakan dari Pemko Batam serta sinergi dengan program pemerintah pusat (seperti pembangunan infrastruktur perkotaan, air limbah domestik, air bersih, dan penataan ruang).

### c. Letak Geografis dan Posisi Strategis Batam

Sebagai kota industri dan perdagangan internasional, Batam memiliki daya tarik investasi yang tinggi sehingga mendorong pengembangan infrastruktur dan tata ruang.

### d. Ketersediaan SDM Teknis

Walaupun masih perlu peningkatan kualitas, Dinas CKTR sudah memiliki aparatur dengan kompetensi teknis dasar di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur.

### e. Pengalaman dalam Penyelenggaraan Infrastruktur

Telah memiliki pengalaman melaksanakan berbagai proyek pembangunan, penataan ruang, serta pelayanan publik di bidang cipta karya.

### f. Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi

Mulainya penerapan sistem informasi tata ruang, perencanaan, dan layanan perizinan berbasis digital dapat memperkuat tata kelola.

### g. Kesadaran Masyarakat yang Mulai Tumbuh

Meski belum merata, sebagian masyarakat sudah mulai memiliki kesadaran pentingnya pengelolaan tata ruang, sanitasi, dan penyediaan air bersih.

### h. Jaringan Kerja Sama dengan Pihak Lain

Adanya peluang kerja sama dengan swasta, BUMN, maupun lembaga donor untuk mendukung pembiayaan dan penyediaan infrastruktur.

## 2. Analisis Kelemahan (*Weaknesses*)

### a. Kualitas SDM yang Belum Optimal

Masih terbatasnya kompetensi aparatur di bidang perencanaan, pengelolaan aset, serta pemanfaatan teknologi informasi.

### b. Pendekatan Pengelolaan Infrastruktur yang Kurang Seimbang

Masih terfokus pada pembangunan fisik, sementara aspek pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan aset belum maksimal.

### c. Terbatasnya Akses dan Kualitas Layanan Air Bersih dan Air Limbah

Pelayanan belum merata di seluruh wilayah, khususnya hinterland, sehingga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

- d. Sistem Tata Kelola yang Masih Birokratis  
Proses administrasi dan pelayanan masih kaku, kurang fleksibel, serta belum sepenuhnya transparan dan terintegrasi.
- e. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung  
Fasilitas pengelolaan limbah domestik, ruang terbuka hijau, dan sarana dasar perkotaan masih belum memadai.
- f. Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah  
Partisipasi masyarakat dalam menjaga tata ruang, menggunakan fasilitas publik sesuai standar, serta mendukung pengelolaan lingkungan masih terbatas.
- g. Minimnya Inovasi dan Kreativitas  
Kapasitas inovasi dalam pelayanan publik dan perencanaan program masih perlu ditingkatkan agar lebih adaptif terhadap perkembangan kota.
- h. Pendanaan yang Terbatas  
Anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur masih bergantung pada APBD dan APBN, sementara kebutuhan jauh lebih besar.
- i. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal  
Sinergi antara Dinas CKTR dengan perangkat daerah lain, instansi pusat, maupun pihak swasta belum berjalan secara maksimal.

### **3. Analisis Peluang (*Opportunity*)**

- a. Dukungan Kebijakan Nasional dan Daerah  
Adanya program pemerintah pusat seperti pembangunan perkotaan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dasar, dan smart city yang dapat diintegrasikan dengan program Dinas CKTR.
- b. Posisi Strategis Batam sebagai Kawasan Perdagangan dan Industri Internasional  
Kebutuhan infrastruktur modern, perumahan, dan fasilitas umum yang meningkat dapat menjadi momentum pengembangan tata ruang yang lebih terencana.
- c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi  
Pemanfaatan sistem informasi geografis (GIS), e-planning, dan layanan digital dapat meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, serta transparansi pelayanan publik.
- d. Dukungan Pendanaan dari Berbagai Sumber  
Peluang kerja sama dengan pemerintah pusat, swasta, BUMN, maupun lembaga donor internasional dalam pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan.
- e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan  
Kesadaran yang terus tumbuh tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik, air bersih, dan tata ruang dapat memperkuat partisipasi publik.
- f. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Batam  
Pesatnya investasi sektor industri, pariwisata, dan properti menciptakan permintaan terhadap infrastruktur perkotaan dan perumahan yang lebih berkualitas.
- g. Arah Pembangunan Berkelanjutan (SDGs dan RPJMN)  
Adanya komitmen pembangunan berkelanjutan menjadi peluang untuk memperkuat tata ruang yang ramah lingkungan, berketahanan iklim, dan inklusif.
- h. Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Program sertifikasi tenaga kerja konstruksi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan profesionalisme dan daya saing.
- i. Inovasi Teknologi Infrastruktur dan Lingkungan

Penggunaan teknologi hijau, energi terbarukan, desalinasi, daur ulang limbah, hingga konsep eco-city dapat menjadi solusi bagi keterbatasan sumber daya.

#### j. Analisis Ancaman (*Threat*)

- Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi yang Pesat  
Lonjakan kebutuhan perumahan, air bersih, dan infrastruktur perkotaan berisiko melampaui kapasitas layanan yang tersedia.
- Keterbatasan Sumber Daya Air Baku  
Risiko krisis air minum akibat terbatasnya sumber air dan meningkatnya persaingan kebutuhan lintas sektor (domestik, industri, pariwisata).
- Alih Fungsi Lahan yang Tidak Terkendali  
Pertumbuhan investasi dan pembangunan dapat menimbulkan ketidaksesuaian tata ruang serta kurangnya lahan resapan air.
- Ketergantungan pada Anggaran Pemerintah  
Jika APBD/APBN terbatas, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dapat terhambat.
- Risiko Bencana dan Perubahan Iklim  
Banjir, rob, cuaca ekstrem, serta kenaikan muka air laut dapat mengganggu tata ruang dan mengurangi daya dukung infrastruktur.
- Persaingan Global dalam Daya Saing Kota  
Jika kualitas infrastruktur dan tata ruang tidak ditingkatkan, daya saing Batam sebagai kota industri dan investasi dapat menurun dibanding kota lain.
- Konflik Kepentingan Antar Sektor  
Kebutuhan lahan dan infrastruktur untuk perumahan, industri, pariwisata, dan lingkungan sering berbenturan, berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan kebijakan.
- Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata  
Rendahnya kepedulian terhadap pengelolaan limbah, sanitasi, dan ketertiban tata ruang dapat menghambat program pemerintah.

#### **Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam<sup>[1]</sup>**

No	Aspek	Permasalahan/Hambatan
1	Belum Optimalnya Pelayanan Air Bersih di Wilayah Hinterland	<p><b>1. Permasalahan dan Hambatan Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran daerah terbatas untuk membangun infrastruktur air bersih di pulau-pulau kecil.</li> <li>- Belum ada pola kerjasama optimal dengan pihak swasta atau lembaga donor.</li> </ul> </li> <li>b. Keterbatasan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedia jaringan perpipaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah hinterland.</li> <li>- Ketergantungan pada sumur gali atau tada hujan yang kualitasnya sering tidak memenuhi standar kesehatan.</li> </ul> </li> <li>c. Kualitas dan Kuantitas Sumber Air <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa pulau memiliki keterbatasan sumber air tawar.</li> <li>- Pencemaran lingkungan (limbah rumah tangga atau laut) menurunkan kualitas air</li> </ul> </li> <li>d. SDM (Sumber Daya Manusia) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan jumlah tenaga teknis yang menguasai pengelolaan dan perencanaan air bersih.</li> <li>- Kapasitas kompetensi (perencanaan jaringan, pemeliharaan instalasi, teknologi pengolahan air) belum merata.</li> <li>- Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Permasalahan dan Hambatan eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan Sumber Air Baku <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah hinterland memiliki ketersediaan air baku yang terbatas dan kualitasnya bervariasi, sehingga sulit dijadikan bahan baku air bersih.</li> </ul> </li> <li>b. Pertumbuhan Penduduk &amp; Kebutuhan Air yang Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laju pertumbuhan permukiman baru lebih cepat daripada penyediaan infrastruktur air bersih.</li> </ul> </li> </ul>

No	Aspek	Permasalahan/Hambatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kondisi Geografis Kepulauan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebaran wilayah hinterland yang terpisah pulau-pulau kecil menambah kompleksitas biaya dan teknis distribusi.</li> </ul> </li> <li>d. Ketergantungan pada Pihak Ketiga (BP Batam / Swasta) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan penyediaan air sebagian dikelola oleh badan lain, sehingga koordinasi antar instansi belum selalu sinkron.</li> </ul> </li> <li>e. Partisipasi Masyarakat Masih Rendah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya penghematan dan pemeliharaan fasilitas air bersih.</li> </ul> </li> <li>f. Cuaca &amp; Perubahan Iklim <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musim kemarau panjang sering mengurangi ketersediaan air baku dan memicu krisis air.</li> </ul> </li> </ul>
2	Belum Optimalnya Pelayanan Air Limbah Domestik di Wilayah Hinterland	<p><b>1. Permasalahan dan Hambatan Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Limbah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya jaringan perpipaan air limbah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan fasilitas septik komunal di sebagian besar wilayah hinterland.</li> </ul> </li> <li>b. Keterbatasan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana pembangunan dan operasional infrastruktur pengelolaan air limbah masih minim dibandingkan kebutuhan.</li> </ul> </li> <li>c. Sistem Data &amp; Monitoring Lemah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada basis data yang terintegrasi mengenai kondisi sanitasi dan air limbah di hinterland, sehingga sulit menyusun perencanaan yang akurat.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Permasalahan dan Hambatan Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pola Pemukiman &amp; Pertumbuhan Penduduk <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemukiman di hinterland cenderung menyebar, tidak terencana, dan kepadatan rendah sehingga membuat pembangunan sistem perpipaan terpusat kurang efisien.</li> </ul> </li> <li>b. Kondisi Geografis Kepulauan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah hinterland terdiri dari pulau-pulau kecil yang terpisah, menambah tantangan teknis dan biaya untuk membangun serta mengoperasikan sistem pengelolaan limbah.</li> </ul> </li> <li>c. Perilaku &amp; Kesadaran Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehat, masih banyak praktik pembuangan langsung ke laut/sungai.</li> </ul> </li> <li>d. Ketergantungan pada Septik Tank Individual <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan septic tank rumah tangga yang tidak memenuhi standar, sehingga berpotensi mencemari tanah dan air tanah.</li> </ul> </li> <li>e. Keterbatasan Regulasi &amp; Penegakan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aturan teknis pengelolaan limbah domestik belum sepenuhnya diterapkan dan penegakan hukum masih lemah.</li> </ul> </li> <li>f. Dukungan Pihak Ketiga Masih Terbatas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan swasta dan lembaga non-pemerintah dalam investasi dan operasional sistem sanitasi di hinterland masih rendah.</li> </ul> </li> <li>g. Dampak Lingkungan &amp; Iklim <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan iklim memicu pasang surut dan banjir rob yang memperburuk pencemaran akibat sistem sanitasi yang belum memadai.</li> </ul> </li> </ul>
3	Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang	<p><b>1. Permasalahan dan Hambatan Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan Data dan Peta Tata Ruang Terintegrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya basis data spasial yang mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses untuk monitoring pemanfaatan ruang.</li> </ul> </li> <li>b. Koordinasi Antar-Bidang Belum Optimal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinkronisasi internal (perencanaan, pengendalian, dan pengawasan) masih lemah sehingga pemanfaatan ruang tidak terpantau secara efektif.</li> </ul> </li> <li>c. SDM Perencana dan Pengawas Terbatas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan tenaga teknis di bidang perencanaan tata ruang serta pengendalian/pengawasan pemanfaatan ruang.</li> </ul> </li> <li>d. Keterbatasan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana untuk kegiatan pengendalian, pemetaan, dan penegakan aturan pemanfaatan ruang masih kurang dibanding kebutuhan.</li> </ul> </li> <li>e. Pemanfaatan Teknologi Rendah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimalnya penggunaan sistem informasi geospasial, digitalisasi tata ruang, serta aplikasi pemantauan berbasis teknologi.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Permasalahan dan Hambatan Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Rendah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak aktivitas pembangunan dan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang karena lemahnya kesadaran hukum.</li> </ul> </li> <li>b. Pertumbuhan Penduduk dan Investasi yang Cepat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laju urbanisasi, pertumbuhan permukiman, dan investasi lebih cepat daripada pembaruan RTR dan kapasitas pengendalian.</li> </ul> </li> <li>c. Keterbatasan Koordinasi Antar Lembaga</li> </ul>

No	Aspek	Permasalahan/Hambatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum sinkronnya kewenangan antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan instansi lain terkait pemanfaatan ruang.</li> <li>d. Tumpang Tindih Regulasi dan Kewenangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada perbedaan kebijakan pusat, daerah, dan BP Batam terkait pengaturan tata ruang, sehingga implementasi di lapangan tidak seragam.</li> </ul> </li> <li>e. Tekanan Ekonomi dan Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dorongan masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan lahan demi kebutuhan ekonomi sering kali mengabaikan kesesuaian RTR.</li> </ul> </li> <li>f. Kurangnya Partisipasi Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat dan investor kurang dilibatkan dalam proses perencanaan maupun sosialisasi tata ruang, sehingga kepatuhan rendah.</li> </ul> </li> <li>g. Faktor Geografis dan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian wilayah memiliki keterbatasan daya dukung lingkungan (rawan banjir, abrasi, kawasan lindung), namun masih digunakan untuk pembangunan.</li> </ul> </li> </ul>
4	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur perkotaan berpengaruh terhadap kenyamanan, aksesibilitas, serta daya saing kota	<p><b>1. Permasalahan dan Hambatan Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lebih besar dibandingkan dengan pagu yang tersedia.</li> </ul> </li> <li>b. Kapasitas SDM Terbatas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dan kompetensi aparatur dalam perencanaan, pengawasan, serta pengendalian pembangunan infrastruktur masih belum merata.</li> </ul> </li> <li>c. Perencanaan Belum Terintegrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pembangunan infrastruktur antar bidang/subsektor (air bersih, air limbah komunal) belum sepenuhnya sinkron.</li> </ul> </li> <li>d. Kelemahan Sistem Monitoring &amp; Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimal pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk memantau kondisi infrastruktur dan mengevaluasi kinerja layanan.</li> </ul> </li> <li>e. Koordinasi Internal Kurang Optimal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada sekat birokrasi antar bagian di lingkungan CKTR sehingga pelaksanaan program sering tidak sinkron.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Permasalahan/Hambatan Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi Cepat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laju pertumbuhan permukiman dan jumlah penduduk lebih cepat daripada penyediaan infrastruktur.</li> </ul> </li> <li>b. Pemerataan Infrastruktur Kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur lebih banyak terkonsentrasi di pusat kota, sementara wilayah pinggiran dan hinterland tertinggal.</li> </ul> </li> <li>c. Tumpang Tindih Kewenangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pembagian kewenangan antara Pemko Batam, BP Batam, dan instansi pusat kadang menyebabkan keterlambatan atau tumpang tindih program pembangunan.</li> </ul> </li> <li>d. Keterbatasan Lahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan ruang kota (lahan permukiman, transportasi, dan ruang terbuka hijau) menjadi kendala untuk pengembangan infrastruktur baru.</li> </ul> </li> <li>e. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Rendah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang mendukung pemeliharaan infrastruktur (fasilitas publik yang cepat rusak).</li> </ul> </li> <li>f. Ketergantungan pada Pihak Ketiga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa infrastruktur strategis dikelola swasta/BP Batam, sehingga koordinasi, pemeliharaan, dan pemerataan terkadang tidak selaras dengan kebutuhan Pemko.</li> </ul> </li> <li>g. Faktor Lingkungan dan Iklim <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rawan banjir, rob, dan perubahan iklim menimbulkan beban tambahan pada infrastruktur perkotaan.</li> </ul> </li> </ul>
5	Penyelenggaraan jasa konstruksi saat ini masih belum optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan	<p><b>1. Permasalahan dan Hambatan Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas SDM Jasa Konstruksi Terbatas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dan kompetensi tenaga ahli/teknis di bidang konstruksi belum merata, termasuk dalam aspek manajemen proyek, pengawasan mutu, dan K3 (Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja).</li> </ul> </li> <li>b. Keterbatasan Anggaran &amp; Efisiensi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran untuk kegiatan jasa konstruksi masih belum sebanding dengan kebutuhan, ditambah efisiensi pelaksanaan belum optimal.</li> </ul> </li> <li>c. Kualitas Perencanaan &amp; Pengawasan Belum Maksimal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada gap antara dokumen perencanaan dengan kondisi lapangan, serta pengawasan proyek yang kadang kurang ketat.</li> </ul> </li> <li>d. Penggunaan Teknologi Rendah</li> </ul>

No	Aspek	Permasalahan/Hambatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan teknologi konstruksi modern, Building Information Modeling (BIM), dan sistem digitalisasi proyek masih terbatas.</li> </ul> <p><b>2. Permasalahan/Hambatan Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas Pelaku Usaha Konstruksi Bervariasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua kontraktor, konsultan, atau penyedia jasa konstruksi memiliki kompetensi dan standar mutu yang sama.</li> </ul> </li> <li>b. Ketergantungan pada Pihak Ketiga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak proyek strategis melibatkan pihak swasta atau BP Batam, sehingga koordinasi tidak selalu sejalan dengan kebutuhan Pemko.</li> </ul> </li> <li>c. Regulasi dan Perizinan yang Kompleks <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pengadaan, perizinan, dan regulasi jasa konstruksi kadang berbelit, menunda pelaksanaan proyek.</li> </ul> </li> <li>d. Minimnya Inovasi &amp; Teknologi Ramah Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik konstruksi berkelanjutan (green construction) masih belum banyak diterapkan.</li> </ul> </li> <li>e. Fluktuasi Harga Material &amp; Ketersediaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga material konstruksi yang tidak stabil dan keterbatasan pasokan berdampak pada kualitas serta ketepatan waktu proyek.</li> </ul> </li> <li>f. Kesadaran terhadap Aspek Keamanan &amp; Keberlanjutan Rendah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian pelaku jasa konstruksi masih menomorsatukan biaya murah dibanding aspek keamanan, mutu, dan keberlanjutan.</li> </ul> </li> <li>g. Faktor Sosial &amp; Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penolakan masyarakat, keterbatasan lahan, serta tantangan kondisi geografis Batam (rawan banjir/abrsasi) dapat menghambat pelaksanaan proyek.</li> </ul> </li> </ul>

### 2.3.3. Peluang Dan Tantangan

Optimalisasi pembangunan tentu saja terus diupayakan agar pemenuhan infrastruktur dasar tetap terpenuhi secara maksimal. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar tentunya mempengaruhi tingkat sosial dan kultur masyarakat. Dalam rangka pemenuhan tersebut tentu saja banyak hal yang masih menjadi kendala sehingga pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak optimal. Secara umum tantangan dan peluang yang juga menjadi pokok permasalahan dalam penyelenggaraan urusan yang diampu dan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selama 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan pemetaan.

#### a. Peluang

1. Pertumbuhan Infrastruktur & Investasi Besar
  - Banyak proyek strategis yang berjalan atau direncanakan di Batam
  - Potensi untuk menarik investasi besar luar negeri (misalnya di kawasan free trade / digital park) memberikan peluang untuk kolaborasi, pendanaan, dan transfer teknologi.
2. Kebijakan Permudah Perizinan & Transparansi Tata Ruang
  - Pemerintah Kota Batam telah membuat kemudahan dalam persetujuan pemanfaatan ruang (PKKPR)
  - Adanya platform RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang bisa diakses secara publik ("RTR Online") meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat serta pelaku usaha mengetahui zonasi.
3. Regulasi Organisasi & Sistem Kerja yang Diperbarui
  - Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2024 mengatur susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan sistem kerja Dinas CKTR.
  - Adanya dokumen RENJA (Rencana Kerja) dan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang menunjukkan upaya perencanaan & evaluasi kinerja.
4. Kebutuhan akan tata ruang dan pembangunan yang terintegrasi

- Masalah seperti drainase, banjir, perda hijau/buffer zone, dan ruang terbuka publik menjadi isu nyata. Ini membuka peluang bagi CKTR untuk membuat solusi inovatif dan intervensi yang berdampak besar.
- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang publik dan lingkungan hidup semakin meningkat, mendukung penerimaan untuk proyek-proyek penataan ruang atau revitalisasi. Misalnya revitalisasi Dang Anom Park yang mempertimbangkan identitas budaya dan ruang publik.

## 5. Kolaborasi Antar Instansi & Partisipasi Publik

- Terdapat FGD Monitoring & Evaluasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang yang melibatkan berbagai pihak.
- Kemudahan memperoleh informasi zonasi memungkinkan masyarakat dan swasta ikut serta dalam perencanaan/pengawasan lebih awal.

### b Tantangan

#### 1. Keterbatasan Lahan / Konflik Guna Lahan;

- Batam mengalami pertumbuhan cepat, namun lahan yang tersedia terbatas dan sering terjadi konflik antara penggunaan lahan yang direncanakan vs pengembangan komersial ilegal. Misalnya zona buffer hijau yang berubah fungsi menjadi bangunan komersial tanpa izin yang jelas.
- Masalah legalitas dan kepemilikan tanah menghambat pembangunan fasilitas umum.

#### 2. Terbatasnya sumber air baku untuk mendukung penyediaan air minum dan menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan;

- Ketergantungan pada sumber air terbatas – ketersediaan air baku hanya dari sumber tertentu (waduk, sungai, atau air tanah) yang kapasitasnya tidak sebanding dengan kebutuhan
- Tingginya biaya infrastruktur penyediaan air baku alternatif – seperti desalinasi, daur ulang air limbah, maupun pembangunan waduk baru
- Keterbatasan koordinasi antar sektor dan wilayah – pengelolaan air baku memerlukan sinergi lintas daerah dan lembaga, namun sering terhambat oleh kepentingan masing-masing.

#### 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan pelayanan air limbah domestik sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

- Keterbatasan infrastruktur pendukung (sistem pengolahan terpusat, jaringan perpipaan, fasilitas pengolahan lumpur tinja) yang membuat masyarakat sulit mengakses layanan sesuai standar
- Pengawasan dan penegakan regulasi yang belum optimal sehingga masih banyak praktik pengelolaan limbah tidak sesuai aturan
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif air limbah domestik yang tidak dikelola sesuai standar (pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, penurunan kualitas air tanah)

#### 4. Masih terbatasnya akses pelayanan air limbah domestik dan peningkatan kualitas fasilitas air limbah domestik masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing Kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan

- Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana – sistem pengolahan terpusat, jaringan perpipaan air limbah, dan fasilitas pengolahan lumpur tinja masih belum memadai.
- Keterbatasan anggaran dan investasi – pembangunan serta peningkatan fasilitas pengolahan air limbah membutuhkan biaya besar, sementara dukungan APBD/APBN dan investasi swasta terbatas.

- Pengaruh terhadap daya saing kota – terbatasnya layanan air limbah dapat menurunkan citra kota sehat, berwawasan lingkungan, dan layak investasi
5. Masih terbatasnya setiap pekerja terampil jasa konstruksi memiliki sertifikasi keahlian
    - Keterbatasan biaya dan akses pelatihan – banyak pekerja konstruksi berasal dari golongan menengah ke bawah sehingga sulit membiayai sertifikasi
    - Keterbatasan regulasi dan pengawasan dalam mewajibkan tenaga kerja konstruksi bersertifikat pada setiap proyek.
    - Tantangan daya saing tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing yang umumnya sudah memiliki sertifikasi keahlian
  6. Lingkungan dan Keberlanjutan
    - Hilangnya ruang terbuka hijau, degradasi lingkungan, polusi, dan pengelolaan sampah menjadi tantangan serius. Kesadaran terhadap pembangunan ramah lingkungan kadangkala kalah cepat dibanding kebutuhan ekonomi.
    - Dampak perubahan iklim seperti curah hujan ekstrem butuh mitigasi infrastruktur adaptif.

#### **2.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang**

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029, isu-isu penting/strategis yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi adalah meliputi :

1. Meningkatkan dan mempertahankan kenyamanan prasarana serta sarana bangunan, baik bangunan pemerintah maupun fasilitas pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan tata ruang antara penyelenggaraan tata ruang nasional, provinsi dan kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang.
3. Menyelaraskan pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi wilayah hinterland.
4. Penyelenggaraan Cipta Karya ke depan diharapkan tidak lagi terhambat oleh sistem yang birokratis dan kurang fleksibel, serta mampu meningkatkan kapasitas inovasi dan kreativitas
5. Kegiatan pengelolaan infrastruktur saat ini masih lebih terfokus pada aspek pembangunan, sementara aspek pemanfaatan dan pengembangan aset belum mendapatkan perhatian yang memadai
6. Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang masih menghadapi keterbatasan kualitas yang perlu ditingkatkan guna menjawab tuntutan tugas dan pelayanan publik

Keenam isu penting tersebut menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, tidak terkecuali pada perencanaan program kegiatan Tahun 2024.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sesuai dengan Rancangan Awal dan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Pemerintah Kota Batam Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai meliputi :

- 1 Meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah domestik;
- 2 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;

- 3 Meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang;
- 4 Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu terdapat 6 Program yang mendukung sasaran diatas menjadi tanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan target/indikator yang harus dicapai yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  
Indikator : Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang sebesar 32.05 %)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  
Indikator : Persentase penduduk yang terlayani air bersih sebesar 54.57 %
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Indikator : Persentase penduduk yang terlayani air limbah domestik sebesar 58.96%)
4. Program Penataan Bangunan Gedung  
Indikator : Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar sebesar 33.33 %
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi  
Indikator : a. Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi 33.33 %  
2. Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar 27.27 %
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator : a. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD sebesar 90.84 poin  
b. Nilai SAKIP PD sebesar 74.33

**Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					201.281	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					201.281	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>			Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.84 poin	39.095	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.84 poin	35.608	
				Nilai SAKIP PD	74.33		Nilai SAKIP PD	74.33			
1.03.01.2.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	7	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	7	
1.03.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	3		
1.03.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	4		
1.03.01.2. 02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	25.907	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	25.907	
1.03.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 orang/bulan	25.624	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 orang/bulan	21.964	
1.03.01.2. 02.0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	282	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	282	
1.03.01.2. 05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	269	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	269	
1.03.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	158	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	158	
1.03.01.2. 05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	110	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	111	
1.03.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	1.418	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	1.418	
1.03.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	16	
1.03.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	301	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	301	
1.03.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	25	
1.03.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	Catatan Analisis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.03.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11		
1.03.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.051	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.051		
<b>1.03.01.2. 07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.162</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.162</b>		
1.03.01.2. 07.0002	Pengadaan kendaraan dinas	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	468	Pengadaan kendaraan dinas	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	468		
1.03.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket	140	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 unit	140		
1.03.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	552	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	552		
<b>1.03.01.2. 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>675</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>585</b>		
1.03.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	497	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	543		
1.03.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	178	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41		
<b>1.03.01.2. 09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>1.0531</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>1.053</b>		
1.03.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41		
1.03.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	584	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	584		
1.03.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	78	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	78		
1.03.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	349	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	349		
<b>1.03.01.2. 10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		<b>Persentase Rumah Tangga yang dilayani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan</b>	<b>54.57 %</b>	<b>5.205</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		<b>Persentase Rumah Tangga yang dilayani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan</b>	<b>54.57 %</b>	<b>5.205</b>		
1.03.01.2. 10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.205	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.205		
<b>1.03.03</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>Persentase penduduk yang terlayani air bersih</b>	<b>54.57%</b>	<b>83.421</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>Persentase penduduk yang terlayani air bersih</b>	<b>54.57%</b>	<b>86.338</b>		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	Catatan Analisis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.03.03.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.000 jiwa	83.421	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.000 jiwa	86.338		
1.03.03.2. 01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Batam	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 dokumen	666	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Batam	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 dokumen	666		
1.03.03.2. 01.0026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	25.885	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	28.802		
1.03.03.2. 01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	37.770	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	37.770		
1.03.03.2. 01.0029	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	35 unit	17.190	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 unit	17.790		
1.03.03.2. 01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	240SR	1.909	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	240 SR	1.909		
1.03.05	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase penduduk yang terlayani air limbah domestik	58.96 %	5.851	Program PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	58.96 %	5.851		
1.03.05.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penduduk yang terlayani tangki septic/ MCK	800 jiwa	5.851	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penduduk yang terlayani tangki septic/ MCK	800 jiwa	5.851		
1.03.05.2. 01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Batam	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota			Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Batam	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota				
1.03.05.2. 01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Batam	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1000 M³/Hari	5.581	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Batam	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1000 M³/Hari	5.851		
1.03.08	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	33.33	71.474	Program PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	33.33%	71.474		
1.03.08.2. 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)	440 unit	71.474	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)	440 unit	71.474		
1.03.08.2. 01.0017	Pengubahanuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	15 unit	39.167	Pengubahanuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	15 bangunan gedung	39.167		
1.03.08.2. 01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan gedung	10.089	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 bangunan gedung	10.089		
1.03.08.2. 01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung	Kota Batam	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan	15 dokumen	21.807	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan	15 dokumen	21.807		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	Catatan Analisis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.08.2. 01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Batam	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	407 dokumen	409	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Batam	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	407 dokumen	409		
1.03.11	<b>PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>			Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	33.33 %	565	<b>PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	33.33 %	565	
				Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan	27.27 %				Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan	27.27 %		
1.03.11.2. 01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi	Terampil	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	400 orang	543	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>		Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	400 orang	543		
1.03.11.2. 01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kota Batam	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	300 orang	404	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Kota Batam	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	300 orang	404		
1.03.11.2. 01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Batam	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	19 lembaga	139	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Batam	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Lembaga	139		
1.03.11.2. 04	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>			Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Laporan	21	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>		Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Laporan	21	
1.03.11.2. 04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Batam	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	80 paket pekerjaan	10	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Batam	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	80 paket pekerjaan	10		
1.03.11.2. 04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	10 Bangunan Konstruksi	5	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	10 Bangunan Konstruksi	5.6		
1.03.11.2. 04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	10 Badan usaha	5	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	10 Badan usaha	5.6		
1.03.12	<b>PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang	32.05 %	4.360	<b>PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang	32.05 %	4.360	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	Catatan Analisis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	403 dokumen	3.271	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	403 dokumen	3.271		
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	401 dokumen	1.042	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	401 dokumen	1.042		
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.228	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.228		
1.03.12.2.02	Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	50 orang	19	Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	50 orang	19		
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 dokumen	19	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 kegiatan	19		
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang		Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	2 dokumen	927	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	2 dokumen	927		
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 dokumen	805	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	5 dokumen	805		
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kota Batam	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dokumen	122	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kota Batam	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dokumen	122		
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	5 dokumen	141	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	5 dokumen	141		
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	0	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	0		
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kota Batam	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	5 Dokumen	122	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kota Batam	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	5 Dokumen	122		
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disincentif non fiskal	Kota Batam	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disincentif non fiskal	1 Dokumen	19	Pemberian insentif dan/atau disincentif non fiskal	Kota Batam	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disincentif non fiskal	1 berita acara	19		

Penyebab perbedaan pagu indikatif (rancangan awal RKPD) dan kebutuhan dana (hasil analisis kebutuhan) adalah dikarenakan :

1. Keterbatasan Fiskal Daerah

- Pagu indikatif ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sementara kebutuhan dana dihitung berdasarkan total kebutuhan program/kegiatan prioritas.
- Adanya keterbatasan penerimaan daerah (PAD maupun transfer pusat) menyebabkan tidak semua kebutuhan dapat terakomodir.

2. Perbedaan Perspektif Perencanaan

- Kebutuhan dana dihitung dari usulan teknis perangkat daerah sesuai kebutuhan lapangan.
- Pagu indikatif lebih mempertimbangkan plafon anggaran makro, prioritas pembangunan kota, serta kemampuan realisasi keuangan.

3. Banyaknya Program Prioritas yang Bersifat Strategis

- Sektor cipta karya dan tata ruang memiliki program dengan biaya besar (pembangunan infrastruktur, air bersih, sanitasi, penataan ruang).
- Sementara alokasi anggaran harus berbagi dengan sektor lain yang juga prioritas (pendidikan, kesehatan, transportasi, dll.).

4. Dinamika Kebijakan dan Regulasi

- Adanya kebijakan nasional/daerah baru, perubahan regulasi, atau penyesuaian target pembangunan bisa menambah kebutuhan dana.
- Namun, pagu indikatif belum tentu bisa langsung menyesuaikan karena ditetapkan lebih awal.

5. Keterbatasan Dukungan Pendanaan Alternatif

- Belum optimalnya pola kerja sama dengan swasta (KPBU, CSR, atau investasi) membuat sebagian besar kebutuhan dana masih dibebankan pada APBD.
- Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan pagu yang tersedia.

6. Faktor Teknis Perencanaan dan Penganggaran

- Dalam penyusunan Dokumen Renja dan Renstra, kebutuhan biasanya dihitung secara ideal (best scenario).
- Namun pada tahap penetapan pagu, dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta prioritas jangka pendek.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penyusunan Dokumen Renja PD selain berasal dari rencana kerja pemerintah daerah, juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Usulan masyarakat disampaikan melalui musrenbang secara bertingkat dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Sementara usulan DPRD Kota Batam berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses DPRD Kota Batam yang telah diparipurnakan dan disampaikan baik secara tertulis maupun terinput dalam SIPD RI.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Telaahan usulan dari berbagai kepentingan yang masuk pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No (1)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran/Volume (5)	Catatan (6)
	<b>1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase penduduk yang terlayani air bersih</b>			
	<b>1.03.03.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam</b>			
	<b>1.03.03.2.01.0028. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</b>	<b>Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun</b>			
	pembangunan SPAM Pulau Panjang Kel. Sijantung Kec.Galang	Kel. Sijantung Kec.Galang		1 lokasi	
	Pembangunan SPAM Kel. Sijantung Kec. Galang	Kel. Sijantung Kec. Galang		1 lokasi	
	Pembangunan SPAM Teluk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang	Kel. Galang Baru Kec. Galang		1 lokasi	
	Pembangunan SPAM Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang	Pulau Karas Kec. Galang		1 lokasi	
	Lanjutan Pembangunan SWRO Belakang Padang	SWRO Belakang Padang		1 lokasi	
	<b>1.03.03.2.01.05. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu</b>			
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Kasu	WTP Kasu		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Setokok	WTP Setokok		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Mecan	WTP Mecan		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pemping	WTP Pemping		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Ngenang	WTP Ngenang		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pecung	WTP Pecung		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Jaloh	WTP Jaloh		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Terong	WTP Terong		1 lokasi	
	Pemeliharaan SWRO Pulau Labu	Pulau Labu		1 lokasi	
	<b>1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Percentase bangunan gedung daerah yang dikelola</b>			
	<b>1.03.08.2.01. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)</b>			
	<b>1.03.08.2.01.0021. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Pembangunan Gedung Kantor Bersama 2	Kota Batam		1 lokasi	
	Pembangunan Gedung City Hall	Kota Batam		1 lokasi	
	Pembangunan kantor Lurah Sungai Harapan Kec. Sekupang	Kota Batam		1 lokasi	
	Pembangunan kantor Lurah Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja	Kota Batam		1 lokasi	
	Pembangunan Gedung Pengawas dan Penilik (Dinas Pendidikan)	Kota Batam		1 lokasi	
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perpustakaan Kota Batam	Kota Batam		1 lokasi	
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Kota Batam		1 lokasi	
	Pembangunan Pagar RSUD Kota Batam	Kota Batam		1 lokasi	
	Pembangunan Pagar Kantor DPRD Kota Batam	Kota Batam		1 lokasi	
	Lanjutan Pembangunan Pagar Dataran Engku Putri Batam Centre	Kota Batam		1 lokasi	
	Pembangunan Panggung Dataran Engku Putri Batam center	Kota Batam		1 lokasi	
	Penataan Dataran Engku Putri Batam Centre	Kota Batam		1 lokasi	
	<b>1.03.08.2.01.0017. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan</b>			
	Revitalisasi Kantor Lurah Tiban Lama	Sekupang		1 lokasi	
	Revitalisasi Kantor Lurah Batu Besar	Nongsa		1 lokasi	
	Revitalisasi Gedung Beringin Kota Batam	Kota Batam		1 lokasi	
	Revitalisasi Gedung Workshop TPA Telaga Punggur	Punggur		1 lokasi	
	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk	Sei Beduk		1 lokasi	
	Revitalisasi Gedung Pertemuan Kantor Lurah Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk	Sei Beduk		1 lokasi	
	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Mangsang Kec. Sei Beduk	Sei Beduk		1 lokasi	
	Revitalisasi Rumah dinas Lurah Mangsang Kec. Sei Beduk	Sei Beduk		1 lokasi	
	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Duriangkang Kec. Sei Beduk	Sei Beduk		1 lokasi	
	Revitalisasi Gedung Kantor Camat Belakang Padang	Belakang padang		1 lokasi	
	Revitalisasi/Rehab Kantor Dinas Perikanan Kota Batam	Kota Batam		1 lokasi	
	Sarana Prasarana Masjid Agung Batam Center	Kota Batam		1 lokasi	
	Lanjutan Revitalisasi Masjid Agung Batam Center	Kota Batam		1 lokasi	
	Revitalisasi Lapangan Tenis Pemko Batam	Kota batam		1 lokasi	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke enam yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025–2029. Adapun tujuan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman, dan sesuai rencana tata ruang dan pemenuhan infrastruktur dasar. Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:
  1. Meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah domestik;
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  3. Meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang;
  4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.2 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026**

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
I	Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman, dan sesuai rencana tata ruang	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Tata Ruang	79.36

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
	ruang dan pemenuhan infrastruktur dasar		
1.1.	Meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah domestik	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan Air limbah Domestik.	56.77 %
1.2.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	90.84
1.3.	Meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	84 %
1.4.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rasio kepatuhan PBG	97.3

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029 Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi II : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang dan Misi IV : Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengusulkan enam (6) program, tujuh belas (17) kegiatan, empat puluh tiga (45) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 204.198.126.694,16,- (Dua Ratus Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Enam Belas Rupiah). Adapun program dan kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1. Sub Kegiatan :
      - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1 Sub Kegiatan :
      - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 1.3 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.3.1 Sub Kegiatan :
      - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
      - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.4 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.4.1 Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
- 1.5.1 Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.6.1 Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
- 1.7.1 Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
- 1.8.1 Sub Kegiatan :
- a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 2.1 Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.1 Sub Kegiatan :
- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  - b. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
  - c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
  - d. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  - e. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 3.1 Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.1 Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
4. Program Penataan Bangunan Gedung
- 4.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 4.1.1 Sub Kegiatan :
- a. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- b. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKGB), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 5.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- 5.1.1 Sub Kegiatan :
- a. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
  - b. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
- 5.2 Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 5.2.1 Sub Kegiatan :
- a. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
  - b. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
  - c. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 6.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- 6.1.1 Sub Kegiatan :
- a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
  - b. Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
- 6.2 Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah
- 6.2.1 Sub Kegiatan :
- a. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
  - b. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - c. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- 6.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 6.3.1 Sub Kegiatan :
- a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
  - b. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
  - c. Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal

**Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam**

Kode	Urusan/Bid.Urusan Pemda dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				204.198.126.694, 16				155.424.765.24 4
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				204.198.126.694, 16				155.424.765.24 4
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.84	35.608.482.814			90.87	35.618.855.764	
		Nilai SAKIP PD	74.33						
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	7.294.000			100 %	111.000.000	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.126.000			6 Dokumen	65.500.000	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.168.000			12 Laporan	45.500.000	
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	25.907.403.408			100 %	26.200.100.919	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	165 Orang/bulan	25.624.803.408	APBD II		165Orang/bulan	25.878.924.856
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	12 Dokumen	282.600.000	APBD II		12 Dokumen	321.176.063
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	269.322.700			100 %	299.150.500	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	1 Paket	158.332.700	APBD II		1 Paket	131.015.500
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	10 Orang	110.990.000	APBD II		15 Orang	168.135.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	1.418.325.400			100 %	720.014.320	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 paket	16.618.000	APBD II		1 paket	5.377.240
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	5 Paket	301.385.000	APBD II		4 Paket	261.569.330
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	25.000.000	APBD II		1 Paket	25.000.000
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	12.000.000	APBD II		1 Paket	7.260.000
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	12 Dokumen	11.822.400	APBD II		12 Dokumen	21.780.000

Kode	Urusan/Bid.Urusan Pemda dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	1.051.500.000	APBD II		12 Laporan	399.027.750
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>		<b>100 %</b>	<b>1.162.092.700</b>			<b>100 %</b>	<b>943.133.850</b>
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Batam	1 unit	468.830.000	APBD II		1 unit	183.635.000
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	27 unit	140.551.100	APBD II		4 paket	262.668.010
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	35 Unit	552.711.600	APBD II		35 Unit	496.830.840
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>		<b>100 %</b>	<b>585.055.956</b>			<b>100 %</b>	<b>648.235.861</b>
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	543.300.000	APBD II		12 Laporan	602.313.800
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	41.755.956	APBD II		12 Laporan	45.922.061
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>		<b>100 %</b>	<b>1.053.915.650</b>			<b>100 %</b>	<b>1.187.401.314</b>
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 unit	41.080.000	APBD II		1 unit	94.089.600
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	20 Unit	584.683.600	APBD II		20 Unit	745.654.514
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	64 Unit	78.750.000	APBD II		64 Unit	52.175.200
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	1 Unit	349.402.050	APBD II		1 Unit	295.482.000
<b>1.03.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Percentase Rumah Tangga yang di layani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan</b>		<b>54.57 %</b>	<b>5.205.073.000</b>			<b>56,23%</b>	<b>5.384.319.000</b>
1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Batam	1 Unit Kerja	5.205.073.000	APBD II (BLUD)		1 Unit Kerja	5.384.319.000
<b>1.03.03</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Percentase penduduk yang terlayani air bersih</b>		<b>54.57 %</b>	<b>86.338.101.000</b>			<b>56,23%</b>	<b>54.329.469.178</b>
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam</b>		<b>1.000 jiwa</b>	<b>86.338.101.000</b>			<b>1.000 jiwa</b>	<b>54.329.469.178</b>
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kota Batam	2 dokumen	666.000.000	APBD II		2 dokumen	706.559.400
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kota Batam	5 Liter/Detik	28.802.428.050	APBD II		5 Liter/Detik	10.667.407.023
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kota Batam	2,5 Liter/Detik	37.770.192.000	APBD II		2,5 Liter/Detik	23.867.860.894
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Batam	35 unit	17.190.280.950	APBD II		37 unit	18.142.265.384
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Batam	240SR	1.909.200.000	APBD II		240SR	945.376.477
<b>1.03.05</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Percentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik</b>		<b>58.96 %</b>	<b>5.851.481.200</b>			<b>60.28 %</b>	<b>5.398.170.672</b>

Kode	Urusan/Bid.Urusan Pemda dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK		800 jiwa	5.851.481.200			800 jiwa	5.398.170.672
1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Kota Batam						312.279.716
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kota Batam	160 Rumah Tangga	5.851.481.200	APBD II		2000 Rumah Tangga	5.398.170.672
1.03.08	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar		33.33%	71.474.085.670,16			50 %	54.602.790.317
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)		440 unit	71.474.085.670,16			440 unit	54.602.790.317
1.03.08.2.01.0017	Pengembangsaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsaikan	Kota Batam	15 bangunan gedung	39.167.564.111,16	APBD II		15 bangunan gedung	26.288.555.289
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kota Batam	3 bangunan gedung	10.089.662.680	APBD II		3 bangunan gedung	9.093.010.587
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	15 dokumen	21.807.178.879	APBD II		15 dokumen	18.716.717.530
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Batam	407 dokumen	409.680.000	APBD II		407 dokumen	504.506.911
1.03.11	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi		33.33 %	565.227.200			50 %	906.147.085
		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan		27.27 %				45.45 %	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina		400 orang	543.598.400			400 orang	571.397.085
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Kota Batam	300 orang	404.385.200	APBD II		300 orang	431.833.815
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	19 lembaga (100 orang)	139.213.200	APBD II		19 lembaga (100 orang)	139.563.270
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100 dokumen	21.628.800			100 dokumen	334.750.000
1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kota Batam	80 paket pekerjaan	10.377.600	APBD II		80 paket pekerjaan	128.750.000
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Kota Batam	10 Bangunan Konstruksi	5.625.600	APBD II		10 Bangunan Konstruksi	103.000.000
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Kota Batam	10 Badan Usaha	5.625.600	APBD II		10 Badan Usaha	103.000.000
1.03.12	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang		32.05 %	4.360.748.810			49.04 %	4.569.332.228
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan		403 dokumen	3.271.408.810			403 dokumen	3.197.825.542

Kode	Urusan/Bid.Urusan Pemda dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kota Batam	401 dokumen	1.042.902.100	APBD II		401 dokumen	946.413.600
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 dokumen	2.228.506.710	APBD II		2 dokumen	2.251.411.942
<b>1.03.12.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik</b>		<b>50 Orang</b>	<b>19.800.000</b>			<b>50 Orang</b>	<b>126.000.000</b>
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		1 Kegiatan	19.800.000			1 Kegiatan	126.000.000
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>927.552.000</b>			<b>2 dokumen</b>	<b>1.031.475.880</b>
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kota Batam	1 dokumen	805.376.000	APBD II		1 dokumen	879.225.880
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kota Batam	1 dokumen	122.176.000	APBD II		1 dokumen	152.250.000
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>		<b>5 dokumen</b>	<b>141.988.000</b>			<b>5 dokumen</b>	<b>214.030.806</b>
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Batam	0 dokumen	0	APBD II			
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kota Batam	5 dokumen	122.188.000	APBD II		5 dokumen	194.230.806
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kota Batam	1 berita acara	19.800.000	APBD II		1 berita acara	19.800.000

Acuan Format Tabel: Permendagri 86/2017 Tabel T-C.33

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-2 dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan enam (6) program, tujuh belas (17) kegiatan dengan empat puluh tiga (45) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026**

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cata tan Pent ing	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						204.198.126.694.16					155.424.765.244
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						35.608.482.814					35.618.855.764
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD		Percentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Kota Batam	74.33			7.294.000		75,33	111.000.000
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	74.33	6 Dokumen	100%	3.126.000	Pendapatan ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	3.126.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam				3.126.000			
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		74.33	12 Laporan	100 %	4.168.000,00	Pendapatan ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	4.168.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								4.168.000,00			
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25.907.403.408		100 %	13.164.044.28
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Percentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		90.84	165 Orang/bu1	100 %	25.624.803.408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	165 Orang/bul	12.564.844.283
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Kota Batam				2.854.428.782			
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK				Kota Batam				4.348.263.546			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Kota Batam				352.652.004			
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				Kota Batam				361.064.055			
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Kota Batam				158.450.750			
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				Kota Batam				146.025.600			
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Kota Batam				78.593.000			
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK				Kota Batam				295.990.038			
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Kota Batam				170.040.958			
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK				Kota Batam				299.434.416			
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Kota Batam				1.109.268.573			
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK				Kota Batam				173.651.310			
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Kota Batam				198.494			
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK				Kota Batam				108.562			
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				Kota Batam				267.191.202			
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK				Kota Batam				171.610.681			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan						
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Kota Batam				10.661.961					
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Kota Batam				9.945.450					
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Kota Batam				21.986.017					
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Kota Batam				26.835.180					
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Kota Batam				23.237.758					
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Kota Batam				40.631.575					
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			Kota Batam				3.537.282.048					
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			Kota Batam				5.121.520.309					
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			Kota Batam				196.560.560					
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			Kota Batam				5.849.279.141					
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK			Kota Batam				2.708.837.733					
<b>1.03.01.2.02.0003</b>	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>Percentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan</b>		<b>90.84</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>282.600.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>12 Dokumen</b>	<b>599.200.000</b>
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan			Kota Batam				282.600.000					
<b>1.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>269.322.700</b>			<b>100 %</b>	<b>673.924.196</b>
<b>1.03.01.2.05.0002</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya</b>	<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</b>	<b>Percentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>		<b>90.84</b>	<b>1 Paket</b>	<b>100 %</b>	<b>158.332.700</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>1 Paket</b>	<b>368.036.000</b>
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			Kota Batam				158.332.700					
<b>1.03.01.2.05.0009</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD</b>	<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>Percentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>		<b>90.84</b>	<b>10 Orang</b>	<b>100 %</b>	<b>110.990.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>10 Orang</b>	<b>305.888.196</b>
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			Kota Batam				66.250.000					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Kota Batam				44.740.000					
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>1.418.325.400</b>			<b>100 %</b>	<b>1.108.260.500</b>
<b>1.03.01.2.06.0001</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD</b>	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	<b>Percentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>		<b>90.84</b>	<b>1 Paket</b>	<b>100 %</b>	<b>16.618.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>1 Paket</b>	<b>19.184.000</b>
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			Kota Batam				16.618.000					
<b>1.03.01.2.06.0002</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD</b>	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	<b>Percentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>		<b>90.84</b>	<b>5 Paket</b>	<b>100 %</b>	<b>301.385.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>5 Paket</b>	<b>358.376.500</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Kota Batam				123.724.400					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			Kota Batam				35.910.000					
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			Kota Batam				88.546.200					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			Kota Batam				53.204.400					
<b>1.03.01.2.06.0005</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD</b>	<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</b>	<b>Percentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>		<b>90.84</b>	<b>1 Paket</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>1 Paket</b>	<b>25.000.000</b>
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantn-Benda pos			Kota Batam				25.000.000					<b>25.000.000</b>
<b>1.03.01.2.06.0005</b>	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD</b>	<b>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</b>	<b>Percentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>		<b>90.84</b>	<b>2 Paket</b>	<b>100 %</b>	<b>12.000.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>2 Paket</b>	<b>78.850.000</b>
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Kota Batam				12.000.000					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		90.84	12 Dokumen	100 %	11.822.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	221.840.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				Kota Batam				11.822.400				
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		90.84	12 Laporan	100 %	1.051.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	430.010.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam				1.051.500.000				
1.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>1.162.092.700</b>			100 %	<b>2.280.195.665</b>
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		90.84	1 unit	100%	468.830.000			1 unit	
1.3.2.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan								468.830.000				
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		90.84	27 Unit	100 %	140.551.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27 Unit	750.00.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor				Kota Batam				8.050.400				
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel				Kota Batam				66.357.000				
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat				Kota Batam				66.143.700				
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		90.84	35 unit	100 %	552.711.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 unit	1.530.195.665
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Kota Batam				17.907.100				
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Kota Batam				5.457.700				
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin				Kota Batam				32.800.000				
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer				Kota Batam				361.790.000				
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer				Kota Batam				134.756.800				
1.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>585.055.956</b>			100 %	<b>1.400.000.000</b>
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		90.84	12 Laporan	100 %	543.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	550.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				Kota Batam				25.000.000				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				Kota Batam				9.300.000				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Kota Batam				143.000.000				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Kota Batam				288.000.000				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				Kota Batam				78.000.000				
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		90.84	12 Laporan	100 %	41.755.956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	850.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Kota Batam				39.000.000				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Kota Batam				2.400.000				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Kota Batam				96.756				
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Kota Batam				259.200				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.053.915.650			100 %	735.562.987
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		90.84	1 unit	100 %	41.080.000		1 unit		41.080.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan								2.800.000				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				Kota Batam				38.280.000				
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		90.84	15 Unit	100 %	584.683.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	450.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				Kota Batam				48.133.600				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				Kota Batam				507.990.000				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				Kota Batam				17.850.000				
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				Kota Batam				10.710.000				
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		90.84	102 Unit	100 %	78.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		102 Unit	81.862.987
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				Kota Batam				21.350.000				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer				Kota Batam				25.550.000				
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya				Kota Batam				14.600.000				
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				Kota Batam				17.250.00				
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		90.84	1 Unit	100 %	349.402.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	203.700.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				Kota Batam				344.602.050				
5.2.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				Kota Batam				4.800.000				
1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								5.205.073.000			56.23 %	5.900.000.000
1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Percentase Rumah Tangga yang di layani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan		90.84	1 Unit Kerja	54.57 %	5.205.073.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit Kerja	5.900.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD												
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin ( Blud )				Kota Batam				4.848.127.229				
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan ( Blud )				Kota Batam				356.945.771				
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>								86.338.101.000			56.23 %	88.048.863.156
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								86.338.101.000			1.000 jiwa	88.048.863.156
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Percentase penduduk yang terlayani air bersih	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam		54.57 %	2 dokumen	1.000 jiwa	666.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 dokumen	1.997.000.000
5.1.02.02.008.00008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air				Kec. Nongsa				333.000.000				
1	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Tumbar Kec. Nongsa				Pulau Terong Kec. Belakang Padang				333.000.000				
2	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Teluk Sunti Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang								333.000.000				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Pent ing	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Percentase penduduk yang terlayani air bersih	Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam		54.57 %	5 liter/detik	1.000 jiwa	28.802.428.050	Pendapatan Asli Daerah	5 liter/detik	19.558.413.50
5.1.02.03.004.00064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku											
	1	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Jaloh		Pulau Jaloh					145.410.000			
	2	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Lengkang		Pulau Lengkang					117.660.000			
	3	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Subang Mas		Pulau Subang Mas					117.660.000			
	4	Pemeliharaan Tangki Reservoir Rempang Cate		Rempang Cate					117.660.000			
	5	Pemeliharaan Tangki Reservoir Tanjung Gundap		Tanjung Gundap					117.660.000			
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar											
	1	Pembangunan Pagar WTP Geranting		WTP Geranting					424.187.610			
	2	Pembangunan Pagar WTP Pulau Air		WTP Pulau Air					424.187.610			
	3	Pembangunan Pagar WTP Pulau Bertam		WTP Pulau Bertam					424.187.610			
	4	Pembangunan Pagar WTP Pulau Temoyong		WTP Pulau Temoyong					424.187.610			
	5	Pembangunan Pagar WTP Seraya		WTP Seraya					424.187.610			
5.2.04.02.006.00001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku											
		Optimalisasi/Peningkatan IKK Tiangwangkang		Tiangwangkang					5.456.760.000			
		Optimalisasi/Peningkatan SWRO Belakang Padang		SWRO Belakang Padang					15.078.240.000			
		Optimalisasi/Peningkatan SWRO Pulau Labu		SWRO Pulau Labu					1.340.880.000			
		Optimalisasi/Peningkatan WTP Kasu		WTP Kasu					1.440.780.000			
		Optimalisasi/Peningkatan WTP Pemping		WTP Pemping					1.440.780.000			
		Optimalisasi/Peningkatan WTP Setokok		WTP Setokok					1.308.000.000			
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Percentase penduduk yang terlayani air bersih	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam		54.57 %	2.5 Liter/Det	1.000 jiwa	37.770.192.000	Pendapatan Asli Daerah	2.5 Liter/Det	48.489.166.112
5.2.04.03.001.00005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya											
	1	Pembangunan SPAM Kel. Sijantung		Kel. Sijantung					14.342.532.000			
	2	Pembangunan SPAM Pulau Mubut Kel. Karas Kec. Galang		Kel. Karas Kec. Galang					3.594.180.000			
	3	Pembangunan SPAM Pulau Panjang Kel. Sijantung		Kel. Sijantung					16.239.300.000			
	4	Pembangunan SPAM Teluk Nipah Kel. Galang Baru		Kel. Galang Baru					3.594.180.000			
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Percentase penduduk yang terlayani air bersih	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam		54.57 %	150 SR	1.000 jiwa	1.909.200.000	Pendapatan Asli Daerah	150 SR	17.685.573.830

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Pent ing	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan					
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya											
	1	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Sijantung			Kel. Sijantung				477.300.000			
	2	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Mubut Kel. Karas			Kel. Karas Kec. Galang				477.300.000			
	3	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Panjang Kel. Sijantung			Kel. Sijantung				477.300.000			
	4	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Teluk Nipah Kel. Galang Baru			Kel. Galang Baru				477.300.000			
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Percentase penduduk yang terlayani air bersih	Jumlah SPAM yang dioperasikan dan dipelihara	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam		54.57 %	34 Unit	1.000 jiwa	17.190.280.950	Pendapatan Asli Daerah		36 Unit 318.709.709
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia											
	1	Belanja Bahan Kimia SPAM Batu Putih Pulau Karas			Pulau Karas				201.104.250			
	2	Belanja Bahan Kimia (SWRO Belakang Padang)			(SWRO Belakang Padang)				202.142.100			
	3	Belanja Bahan Kimia (SWRO Pulau Labu)			(SWRO Pulau Labu)				121.981.450			
	4	Belanja Bahan Kimia (SWRO Pulau Mubut)			(SWRO Pulau Mubut)				60.023.250			
	5	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Air Lingka)			WTP Pulau Air Lingka				411.127.350			
	6	Belanja Bahan Kimia (WTP Belakang Padang)			WTP Belakang Padang				2.902.416.900			
	7	Belanja Bahan Kimia (WTP Bulang Lintang)			WTP Bulang Lintang				445.226.550			
	8	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Geranting)			(WTP Unit Pulau Geranting)				256.138.050			
	9	Belanja Bahan Kimia (WTP Kampung Baru - Galang)			(WTP Kampung Baru - Galang)				276.195.750			
	10	Belanja Bahan Kimia (WTP Kel. Sijantung)			(WTP Kel. Sijantung)				69.180.750			
	11	Belanja Bahan Kimia (WTP Ngenang Kecamatan Nongsa)			(WTP Ngenang)				312.004.350			
	12	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Petong)			(WTP Pulau Petong)				2930151000			
	13	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Abang)			(WTP Unit Pulau Abang)				180.641.400			
	14	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Air )			(WTP Pulau Air )				206.204.700			
	15	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Air Raja)			(WTP Unit Pulau Air Raja)				231.362.850			
	16	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Bertam)			WTP Unit Pulau Bertam				223.920.300			
	17	Belanja Bahan Kimia SPAM Pulau Cengkui			SPAM Pulau Cengkui				191.613.750			
	18	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Jaloh)			(WTP Unit Pulau Jaloh)				249.294.900			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
	19	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Kasu)		(WTP Unit Pulau Kasu)					164.107.950				
	20	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Mecan)		(WTP Unit Pulau Mecan)					310.677.900				
	21	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Nguan)		(WTP Pulau Nguan)					183.527.400				
	22	Belanja Bahan Kimia SPAM Pulau Panjang		SPAM Pulau Panjang					69.180.750				
	23	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Pecong)		(WTP Unit Pulau Pecong)					255.660.750				
	24	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pemping)		(WTP Unit Pemping)					353.174.250				
	25	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Selat Neneh)		(WTP Pulau Selat Neneh)					221.211.900				
	26	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Seraya)		(WTP Pulau Seraya)					183.527.400				
	27	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Temoyong)		(WTP Pulau Temoyong)					245.215.650				
	28	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Terong)		(WTP Unit Pulau Terong)					245.054.700				
	29	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Rempang Cate)		(WTP Unit Rempang Cate)					154.245.000				
	30	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Setokok)		(WTP Unit Pulau Setokok)					971.610.000				
	31	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Subang Mas)		(WTP Unit Subang Mas)					218.364.750				
	32	Belanja Bahan Kimia (WTP Tanjung Kubu)		(WTP Tanjung Kubu)					191.613.750				
	33	Belanja Bahan Kimia WTP Teluk Nipah		WTP Teluk Nipah					69.180.750				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Kota Batam			5.664.465.000				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Kota Batam			85.800.000				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Kota Batam			717.600.000				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Kota Batam			43.200.000				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Kota Batam			1.793.880				
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Kota Batam			5.339.520				
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>								<b>5.851.481.200</b>		<b>60.28 %</b>	<b>8.362.279.716</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>5.851.481.200</b>		<b>800 jiwa</b>	<b>8.362.279.716</b>	
1.03.05.2.01.39	Peningkatan Sistem Pengengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Percentase penduduk yang terlayani air limbah domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Perkotaan ditingkatkan	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septic/ MCK		58.96 %	150 Rumah Tangga	800 jiwa	0	P ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.28 %	312.279.716
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Percentase penduduk yang terlayani sanitasi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman dibangun	Percentase penduduk yang terlayani sanitasi		58.96 %	1000 M³/Hari	800 jiwa	5.851.481.200	P ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 M³/Hari	8.050.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Pent ing	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat								456.000.000				
	1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kampung Tua Setenggar Kel. Tanjung Piayu		Kampung Tua Setenggar									
	2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Batu Legong Kec. Bulang		Kel. Batu Legong					747.650.000				
	3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Galang Baru Kec. Galang		Kel. Galang Baru					747.650.000				
	4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel.Karas Kec. Galang		Kel.Karas					747.650.000				
	5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang		Kel. Pulau Terong					747.650.000				
	6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Sijantung Kec. Galang		Kel. Sijantung					747.650.000				
	7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pulau Nguan Kelurahan Galang Baru		Pulau Nguan					506.160.000				
	8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pulau Seraya Kel. Batu Legong Kec. Bulang		Pulau Seraya					506.160.000				
	9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kec. Belakang Padang		Pulau Terong					506.160.000				
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								138.751.200				
1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>									71.474.085.670,16		50.00%	
1.03.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>									71.474.085.670,16	440 unit	232.152.376.425	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahanan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai Standar	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Percentase Kualitas Bangunan Gedung Sesuai Standar	Peningkatan Penyelenggaraan Gedung		33.33%	15 Bangunan Gedung	440 unit	39.167.564.111,16	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Bangunan Gedung	148.422.771.342
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli									540.000.000			
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor												
	1	Lanjutan Revitalisasi Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		Kota Batam						484.466.000			
	2	Rehabilitasi Aula balai pertemuan Kantor Lurah Air Raja RT. 003 RW. 001 Kel. Air Raja		Kota Batam						349.333.999,89			
	3	Rehabilitasi Kantor Camat Lubuk Baja		Kota Batam						427.630.500			
	4	Rehabilitasi Kantor Camat Sekupang		Kota Batam						427.630.500			
	5	Rehabilitasi Kantor Lurah Tiban Baru		Kota Batam						427.630.500			
	6	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Duriangkang Kec. Sei Beduk		Kota Batam						1.184.903.000			
	7	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Mangsang Kec. Sei Beduk		Kota Batam						1.184.903.000			
	8	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk		Kota Batam						1.184.903.000			
	9	Revitalisasi Gedung Workshop TPA Telaga Punggur		Kota Batam						625.900.000			
	10	Revitalisasi Kantor Camat Batu Ampar		Kota Batam						1.184.903.000			
	11	Revitalisasi Kantor Camat Belakang Padang		Kota Batam						1.245.145.830			
	12	Revitalisasi Kantor Lurah Baloi Indah		Kota Batam						1.184.903.000			
	13	Revitalisasi Kantor Lurah Batu Merah		Kota Batam						1.184.903.000			
	14	Revitalisasi Kantor Lurah Kampung Pelita		Kota Batam						1.184.903.000			
	15	Revitalisasi Kantor Lurah Lubuk Baja Kota		Kota Batam						1.184.903.000			
	16	Revitalisasi Kantor Lurah Patam Lestari Kec. Sekupang		Kota Batam						1.184.903.000			
	17	Revitalisasi Kantor Lurah Sungai Harapan Kec. Sekupang		Kota Batam						1.184.903.000			
	18	Revitalisasi Kantor Lurah Sungai Jodoh		Kota Batam						1.184.903.000			
	19	Revitalisasi Kantor Lurah Tanjung Pinggir		Kota Batam						1.184.903.000			
	20	Revitalisasi Kantor Lurah Tanjung Riau		Kota Batam						1.184.903.000			
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah												
	1	Lanjutan Revitalisasi Masjid Agung Batam Centre (Tahun Jamak)		Kota Batam						1.191.821.000			
	2	Lanjutan Revitalisasi Masjid Baiturrahman Sekupang		Kota Batam						625.900.000			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam center			Kota Batam						1.590.750.000			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah			Kota Batam					6.994.100.000			
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum											
	1 Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah			Kota Batam					2.146.623.000			
	Revitalisasi Gedung Beringin Kota Batam			Kota Batam					550.750.000			
	Revitalisasi Gedung P2TP2A			Kota Batam					2.810.042.982,27			
	Revitalisasi Lapangan Tenis Pemko Batam			Kota Batam					625.900.000			
	Revitalisasi/Rehabilitasi Rumah Dinas Jalan Kartini			Kota Batam					496.464.800			
	Revitalisasi/Rehabilitasi Rumah dinas Lurah Mangsang Kec. Sei Beduk			Kota Batam					315.845.999			
	Revitalisasi/Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota Batam Tanjung Pinggir Kec. Sekupang			Kota Batam					943.870.000			
	Revitalisasi/Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Walikota Batam Tanjung Pinggir Kec. Sekupang			Kota Batam					943.870.000			
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Bangunan Gedung Sesuai Standar	Peningkatan Penyelenggaraan Gedung Sesuai Standar	33.33%	15 Dokumen	440 unit	21.807.178.879	P ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	15 Dokumen	75.239.948.403
5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar											
	1 Pembangunan Masjid Al Islah			Kota Batam					1.709.928.000			
	2 Pembangunan Masjid dan Asrama Putra Pesantren Al-Fadhlhu 7 Nongsa			Kota Batam					2.719.928.000			
	3 Pembangunan pagar Pura Agung Amerta Bhuanan			Kota Batam					1.800.828.000			
5.2.03.01.001.00001	4 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor											
	1 Pembangunan kantor Lurah Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja			Kota Batam					1.184.903.000			
	2 Pembangunan Gedung Bersama 2			Kota Batam					1.613.170.000			
	3 Pembangunan Gedung Pengawas dan Penilik Dinas Pendidikan			Kota Batam					2.447.458.000			
	4 Pembangunan Kantor Camat Nongsa			Kota Batam					1.184.903.000			
	5 Pembangunan Kantor Lurah Batu Selicin			Kota Batam					1.184.903.000			
	6 Pembangunan Kantor Lurah Tiban Lama			Kota Batam					1.184.903.000			
5.2.03.01.001.00008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah											
	1 review Design Lanjutan Pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam			Kota Batam					357.862.800			
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum											
	1 Pembangunan Gedung Terpadu RSUD (Gedung Pelayanan Terpadu KJSU)			Kota Batam					1.748.934.000			
	2 Pembangunan Gedung Workshop Kerajinan Batik Batam			Kota Batam					493.051.000			
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman											
	1 Pembangunan Landscape Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam			Kota Batam					611.751.200			
5.2.03.04.001.000 04	Belanja Modal Pagar											
	1 Lanjutan Pembangunan Pagar Masjid Agung Batam Centre			Kota Batam					1.377.254.000			
	2 Pembangunan Pagar gedung Serba Guna Kampung Bugis Batu RT. 002 RW. 001 Sel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang			Kota Batam					352.895.640			
	3 Pembangunan Pagar gedung Serba Guna RW. 02 Kampung Jawa Kel. Sekanak Raya Kec Belakang Padang			Kota Batam					352.895.640			
	4 Pembangunan Pagar Kantor DPRD Kota Batam			Kota Batam					171.733.599			
	Pembangunan Pagar Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam			Kota Batam					1.802.928.000			
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsional (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilaian	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai Standar	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsional (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim	Persentase Kualitas Bangunan Gedung Sesuai Standar	Peningkatan Penyelenggaraan Gedung Sesuai Standar	33.33%	407 dokumen	440 unit	409.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	407 dokumen	1.569.348.520

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Cata tan Pent ing	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
	Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG											
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								31.680.000					
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli								378.000.000					
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai Standar	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Percentase Kualitas Bangunan Standar Peningkatan Penyelenggaraan Gedung Sesuai		33.33%	3 Bangunan Gedung	440 unit	10.089.662.680	P ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Bangunan Gedung	6.920.308.160	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				Kel. Tg. Uncang				5.610.220.000					
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				Kel. Tg. Uncang				798.075.200					
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik				Kel. Tg. Uncang				146.250.000					
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Kel. Tg. Uncang				204.100.000					
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Kel. Tg. Uncang				496.000.000					
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Kel. Tg. Uncang				48.000.000					
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Kel. Tg. Uncang				2.066.400					
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Kel. Tg. Uncang				6.142.080					
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum													
1	Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre				Kec. Batam Kota				252.619.000					
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah													
1	Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah				Kel. Tg. Uncang				1.219.540.000					
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Masjid Baiturrahman Sekupang				Kec. Sekupang				435.550.000					
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Masjid Engku Hamidah Batam Kota				Kec. Batam Kota				871.100.000					
1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>								<b>565.227.200</b>			<b>50.00 %</b>	<b>1.253.335.276</b>	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								<b>543.598.400</b>			<b>400 Orang</b>	<b>728.226.000</b>	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Percentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Penigkatan Kualifikasi Tenaga Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Percentase Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Penigkatan Kualifikasi Tenaga Konstruksi		33.33 %	300 Orang	400 Orang	404.385.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Orang	354.410.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam				26.287.200					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				23.100.000					
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaiian Dinas Lapangan (PDL)				Kota Batam				86.100.000					
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaiian Siaga				Kota Batam				50.670.000					
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan				Kota Batam				185.000.000					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam				33.228.000					
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Percentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Percentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Penigkatan Kualifikasi Tenaga Konstruksi		33.33 %	19 Lembaga (100 orang)	400 Orang	139.213.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Lembaga (100 orang)	373.816.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Penigkatan Kualifikasi Tenaga Konstruksi			Kota Batam				48.733.200					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam				16.500.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				46.000.000					
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Kota Batam				27.980.000					
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				Kota Batam				21.628.800			100 dokumen	200.109.276	
<b>1.03.11.12.04.004</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Penigkatan Kualifikasi Tenaga Konstruksi</b>	<b>jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</b>	<b>Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>		33.33 %	80 Paket Pekerjaan	100 dokumen	10.377.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Paket Pekerjaan	200.109.276	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam				873.600					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				9.504.000					
<b>1.03.11.2.04.0005</b>	<b>Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi</b>	<b>Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</b>	<b>Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>		33.33 %	10 Bangunan Konstruksi	100 dokumen	5.625.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Bangunan Konstruksi	5.625.600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam				873.600					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				4.752.000					
<b>1.03.11.2.04.0007</b>	<b>Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi</b>	<b>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</b>	<b>Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>		33.33 %	10 Badan Usaha	100 dokumen	5.625.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Badan Usaha	5.625.600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam				873.600					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				4.752.000					
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>								4.360.748.810			49.04 %	13.479.415.024	
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>								3.271.408.810			403 Dokumen	10.541.325.885	
<b>1.03.12.2.01.03</b>	<b>Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</b>	<b>Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan</b>		32.05 %	401 dokumen	403 Dokumen	1.042.902.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		401 dokumen	1.266.751.81	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam				6.168.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				42.900.000					
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan								708.600.000					
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus													
1	Kajian Pelaksanaan Kegiatan SPPR (Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang)				Kota Batam				99.680.000					
2	Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kampung Tua Nongsa Pantai				Kota Batam				110.363.350					
3	Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan Pesisir Kampung Tua Teluk Mata Ikan Tanjung Bemban Nongsa				Kota Batam				75.190.750					
<b>1.03.12.2.01.10</b>	<b>Penetapan RDTR Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang</b>	<b>Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang</b>		32.05 %	2 Dokumen	403 Dokumen	2.228.506.710	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	9.274.574.070	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam				35.088.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				50.820.000					
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang								918.256.590					
1	Pemutakhiran Peta Dasar Skala 1:5.000				Kota Batam									

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
	2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)			Kota Batam				1.224.342.120					
1.03.12.2.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>19.800.000</b>				50 orang	
1.03.12.2.02.08	Peningkatan Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peran dalam	Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik		32.05 %	1 Kegiatan	50 orang	19.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								19.800.000					
1.03.12.2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>927.552.000</b>				2 Dokumen 1.035.886.241	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan		32.05 %	1 Dokumen	2 Dokumen	805.376.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	1.035.886.241	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				10.956.000					
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang				Kota Batam				784.000.000					
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang		32.05 %	1 Dokumen	2 Dokumen	122.176.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	122.176.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam				10.420.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				10.956.000					
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang				Kota Batam				100.800.000					
1.03.12.2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>141.988.000</b>				5 Dokumen 1.793.076.434	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang				5 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Keitan Pemanfaatan Ruang	Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang		32.05 %	5 Dokumen	5 Dokumen	122.188.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Dokumen	1.567.241.660	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam				14.588.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				7.920.000					
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang				Kota Batam				99.680.000					
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinseitif non fiskal	Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinseitif non fiskal	Persentase Tingkat Kesiapan Dokumen Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Ruang		32.05 %	1 Berita Acara	5 Dokumen	19.800.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Berita Acara	111.072.046p	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam				19.800.000					

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

### **5.1 Catatan Penting**

Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas enam program, tujuh belas kegiatan dan empat puluh tiga sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026).

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Dokumen Renja Tahun 2026.

### **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Dokumen Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029 yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Dokumen Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Dokumen Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Program dan kegiatan pada Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Dokumen Renja Tahun 2026.

Demikian Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam pelayanan kepada masyarakat.

WALIKOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD